

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan judul

Era keterbukaan saat ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang menyatukan banyak dimensi kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, maupun lingkungan hidup melalui proses integrasi, kesalinghubungan dan ketergantungan. Segala sesuatunya dapat dengan mudah mengalir ke berbagai batas wilayah, baik itu jaringan-jaringan, gerakan-gerakan, dan hubungan-hubungan pada hakikatnya meluas melalui semua bidang kegiatan manusia. Oleh karenanya, batas-batas wilayah menjadi semakin kabur dan banyak isu yang melintasi batas-batas nasional (*transnational*) dan konsekuensinya sangat berpengaruh pada kehidupan seluruh warganegara di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Namun adanya globalisasi ini juga mampu menggeser peran negara, yang semestinya bisa menyelesaikan masalahnya secara internal, namun kenyataannya tidak. Mulai banyak lembaga-lembaga non-pemerintah baik yang bersifat nasional maupun yang internasional turut dalam pembuatan kebijakan. Tidak hanya peran negara, proses demokrasi pun tidak dipungkiri untuk tidak terancam. Oleh karena itu, bentuk dan struktur politik serta masyarakat sipil internasional harus dibuat dalam landasan pemikiran dan praktek demokratis.

Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia telah menempuh banyak perubahan dan transformasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Saat ini Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah yang percaya diri sebagai negara demokrasi dan negara anggota dari G-20. Perubahan di tahun 1998 yang membawa kebebasan dan partisipasi politik juga membawa

perubahan tata kelola pembangunan melalui desentralisasi yang mulai efektif di tahun 2004. Perubahan tersebut dimobilisasi oleh gerakan reformasi yang sudah gerah dengan tata kelola pemerintahan yang tertutup dan penuh dengan kerahasiaan serta korupsi. Sekarang, Indonesia telah menemukan momentum lain yang tepat untuk membuat perubahan yang lebih signifikan: pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif di isu-isu publik. Salah satu platform yang paling tepat untuk pemberdayaan ini adalah melalui “Pemerintahan Terbuka” yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan inovasi.¹ Pemerintahan terbuka sangat penting bagi Indonesia dalam menuntaskan proses demokratisasi serta menjadi sarana untuk mencapai perbaikan ekonomi.

Maka dengan adanya ulasan yang dipaparkan oleh penulis, penulis memiliki ketertarikan untuk memilih judul **“Kepentingan Ekonomi-Politik Indonesia Terlibat Dalam Program *Open Government Partnership (OGP)* ”** sebagai judul skripsi.

¹ <http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2013/10/OG-Indonesia-Government-Self-Assessment-Report-2012-ID.pdf>, diakses pada 06 Mei 2014

B. Latar Belakang Masalah

Era baru keterbukaan pemerintah telah tiba. Bagi Indonesia, keterbukaan pemerintah bukan hal baru dan telah dirintis sejak reformasi politik pada tahun 1998. Perubahan di tahun 1998 yang membawa kebebasan dan partisipasi politik juga membawa tata kelola pembangunan melalui desentralisasi yang mulai efektif di tahun 2004. Perubahan tersebut dimobilisasi oleh gerakan reformasi yang sudah gerah dengan tata kelola pemerintahan yang tertutup dan penuh dengan kerahasiaan serta korupsi. Sekarang Indonesia telah menemukan momentum lain yang tepat untuk membuat perubahan yang lebih signifikan seperti pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif di isu-isu publik. Salah satu platform yang paling tepat untuk pemberdayaan ini adalah melalui “Pemerintahan Terbuka” yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan inovasi².

Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakatnya. Motivasi itulah yang mendorong Pemerintah Indonesia bergabung dan menjadi salah satu perintis gerakan global *Open Government Partnership* (OGP) yang diluncurkan pada bulan September 2011. Pemerintah Indonesia melihat keterbukaan sebagai dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, pelayanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus 2012, “Perluasan peran dan partisipasi publik dalam pembangunan hingga

² *Ibid.*,

membuat akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi pemerintahan *Open Government*³.

Pemerintahan yang terbuka sangat penting bagi Indonesia dalam menuntaskan proses demokratisasi serta menjadi sarana untuk mencapai perbaikan ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia tidak hanya pada aspek domestik, tetapi juga pada aspek internasional. Pada aspek domestik, Indonesia berusaha untuk menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam proses tata kelola pemerintahan. Sedangkan dalam aspek internasional, Indonesia berkomitmen melalui inisiatif multilateral dalam mempromosikan keterbukaan. Oleh karena itu, pada bulan September 2011 Pemerintah Indonesia secara resmi menjadi salah satu pendiri dan pencetus gerakan *Open Government Partnership* di New York, Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan agenda pemerintahan terbuka dengan mencanangkan rencana aksi yang mendorong transparansi. *Open Government Partnership* merupakan gerakan yang mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan yang terdiri dari berbagai pengambil kebijakan yang berasal dari perwakilan negara anggota, masyarakat sipil seperti LSM, Akademisi, dan organisasi gerakan, serta kalangan swasta. *Open Government Partnership* berawal dari 8 negara yang menginisiasi yaitu Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat, dan saat ini sudah mencakup 64 negara⁴.

Open Government Partnership ini merupakan inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen yang konkrit bagi pemerintah untuk mempromosikan keterbukaan, memberdayakan masyarakatnya, memberantas korupsi, serta memanfaatkan teknologi untuk

³ *Ibid*

⁴ Pagi Ini, Presiden Buka Konferensi Open Government Partnership, <http://www.setkab.go.id/berita-12922-pagi-ini-presiden-buka-konferensi-open-government-partnership.html> diakses pada 10 Mei 2014

memperkuat pemerintahannya. Dalam semangat kerjasama dengan banyak pemangku kepentingan, OGP diawasi dan dikontrol oleh *Steering Committee*, termasuk wakil-wakil pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Untuk menjadi anggota dari OGP, negara-negara peserta harus memberikan dukungannya pada komitmen pemerintahan yang terbuka di level tertinggi pemerintah yang diikuti dengan konsultasi publik yang melibatkan banyak elemen masyarakat. Kerjasama multilateral *Open Government Partnership* ini terbentuk pada 20 September 2011 ketika kedelapan negara penginisiasi mendukung dan mengesahkan *Open Government Declaration* dan melaporkan rencana aksi dari masing-masing negara. Hanya dalam dua tahun *Open Government Partnership* menerima komitmen 56 negara anggota baru untuk bergabung didalamnya.

Pada 31 Oktober 2013, Indonesia menerima tongkat estafet kepemimpinan *Open Government Partnership* dari Inggris untuk menjadi *chair* selama dua tahun didampingi Meksiko sebagai *co-chair*. Tentunya dengan momentum ini akan banyak membawa manfaat bagi Indonesia. Hal demikian juga diungkapkan oleh Wakil Presiden Indonesia, Boediono, bahwa manfaat dari program ini akan sangat banyak apabila bisa kita satukan dengan program-program yang pemerintah miliki, misalnya dalam konteks reformasi birokrasi⁵. Dalam bidang ekonomi, Indonesia mengikuti *World Islamic Economic Forum* (WIEF) yang pada pertemuan ke-9 juga diadakan di London bersamaan dengan agenda *Open Government Partnership*. Wakil Presiden

⁵ Wakil Presiden Republik Indonesia, Manfaat Open Government Berlipat Ganda

<http://wapresri.go.id/index/preview/berita/2978> diakses pada 24 Agustus 2014

Indonesia, Boediono, juga mengungkapkan bahwa forum ini dapat memperkuat kerjasama antara negara muslim dan negara *non* anggota WIEF⁶.

Keterlibatan Indonesia dalam forum global juga makin diakui dunia internasional. Dalam program kerjasama Uni Eropa (UE)-ASEAN misalnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Program UE-ASEAN “Peningkatan Kapasitas Negosiasi FTA ASEAN” menyelenggarakan Forum Dialog Publik (*PDF-Public Dialogue Forum*) di Jakarta untuk mendiskusikan peran Indonesia, ASEAN dan Uni Eropa dalam memperkuat segala bentuk hubungan perdagangan yang kini semakin berkembang. Keberhasilan perekonomian Indonesia dan ASEAN serta agenda perdagangan dan perekonomian keduanya, menjadi topik utama dalam Forum Dialog tersebut. Peranan Indonesia semakin strategis ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2013 lalu.⁷

Tidak hanya dari pemerintah, dukungan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka juga datang dari Organisasi Masyarakat Sipil seperti Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan Transparency International Indonesia. Transparency International Indonesia merupakan salah satu kantor cabang di Asia Pasifik yang terlibat aktif dalam riset, advokasi, dan kampanye anti korupsi dan tata kelola pemerintahan terbuka sejak tahun 2000. Transparency International Indonesia bekerjasama dengan pemimpin politik pemerintahan, pebisnis, peneliti,

⁶ Dunia Akui Peran Indonesia Di Kancah Internasional, <http://www.antarabengkulu.com/berita/19275/dunia-akui-peran-indonesia-di-kancah-internasional> diakses pada 24 Agustus 2014

⁷ http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130402_01_id.pdf diakses pada 01 September 2014.

media, dan kelompok-kelompok kreatif dan anak muda dalam mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan integritas pemerintah, bisnis, dan masyarakat⁸.

Dukungan yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Sad Dian Utomo, bahwa sebagai lembaga CSO (*Civil Society Organization*), pihaknya diminta untuk menyampaikan pandangan tentang pelaksanaan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang bersih menjadi isu tersendiri yang harus dikerangkakan dalam kepentingan internasional guna mendukung strategi nasional seperti penanggulangan korupsi dan reformasi birokrasi yang dapat berdampak pada taraf hidup masyarakatnya⁹.

Open Government Partnership memiliki visi mendorong banyak pemerintahan yang lebih transparan tidak hanya saat ini, namun juga secara berkelanjutan. Selain itu, *Open Government Partnership* juga ingin terus mengupayakan akuntabilitas pemerintah, dan lebih bertanggung jawab terhadap warganya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahannya, seperti contohnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyatnya. Tentunya hal ini membutuhkan perubahan baik dalam norma-norma maupun budaya untuk memastikan berjalannya dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakatnya. *Open Government Partnership* terus mencita-citakan untuk mendukung pembaharuan baik dalam pemerintah maupun masyarakat melalui dukungan pada pemerintahan yang terbuka hingga kepada tataran politik yang paling tinggi. Selain itu, *Open Government Partnership* juga

⁸ http://www.ti.or.id/media/documents/2014/05/14/1/a/laporan_scorecard_final_low.pdf diakses pada 24 Agustus 2014.

⁹ Dunia Akui Peran Indonesia Di Kancah Internasional, <http://www.antarabengkulu.com/berita/19275/dunia-akui-peran-indonesia-di-kancah-internasional> diakses pada 24 Agustus 2014.

membantu negara-negara yang dirasa sulit dalam melakukan perbaikan dan perubahan, dan membentuk komunitas pendukung yang memiliki satu visi dan satu tujuan dari berbagai negara di dunia.

Saat ini perkembangan OGP sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Di Indonesia misalnya, UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2010 sangat progresif mempromosikan transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan dan proses anggaran terbuka, dan juga berfungsi sebagai alat memerangi korupsi¹⁰. Diungkapkan pula oleh Longgeng Ginting, Direktur Greenpeace Indonesia, bahwa pemerintah telah berupaya untuk memperkenalkan sejumlah UU baru termasuk UU Intelijen, RUU Keamanan Nasional dan RUU Organisasi Massa (RUU ORMAS) yang merongrong hal-hal penting dalam kebebasan demokratis.¹¹

Selain itu, UU Kebebasan Informasi juga berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kroasia setelah satu dekade advokasi dan kampanye publik untuk mendorong perubahan di dalam hukum. Peran masyarakat sipil dalam hal ini adalah mengawasi dan mengevaluasi, serta memastikan bahwa UU Kebebasan Informasi ini berdampak positif bagi masyarakat dan supremasi hukum di tahun-tahun berikutnya.¹²

Sementara itu, di Amerika Serikat, koalisi *Open the Government* (OTG) sudah memiliki hubungan kerja yang solid dengan pemerintahan Bush dan Obama yang terfokus pada pembuatan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, seperti yang diungkapkan oleh McDermott dari OTG tersebut bahwa pemerintah mereka mengambil peran untuk

¹⁰<http://www.ogphub.org/wp-content/uploads/2013/11/meningkatan-pengalaman-ogp.pdf> diakses pada 01 September 2014.

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

mengkoordinasikan dan melibatkan masyarakat sipil lebih luas dan beberapa organisasi internasional untuk pembentukan Rencana Aksi Nasional¹³. Dengan dukungan dari orang-orang penting seperti Presiden AS Barack Obama dan Presiden Brazil Dilma Rouseff, *Open Government Partnership* telah menjadi inisiatif internasional terdepan di dunia untuk meningkatkan transparansi pemerintah. Tak kurang dari 60 negara saat ini telah berpartisipasi dalam OGP¹⁴.

Open Government Partnership memiliki tujuan utama yaitu memastikan bahwa perubahan nyata sudah terjadi di mayoritas negara-negara anggota OGP yang mana perubahan ini tentunya menguntungkan masyarakatnya. Terdapat tiga cara bagi OGP dalam memastikan kondisi-kondisi demikian pada negara anggotanya terhadap pemerintahan yang terbuka. *Pertama*, menjaga kepemimpinan politik dan komitmen negara-negara anggota pada pemerintahan yang terbuka; *kedua*, mendukung perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan domestik dengan keahlian teknis dan inspirasi-inspirasi; dan yang *ketiga* adalah membantu perkembangan negara-negara dalam keterlibatan yang lebih pada pelaksanaan OGP melalui organisasi-organisasi kelompok masyarakat yang bermacam-macam. Dalam perkembangannya, nantinya OGP juga akan memastikan bahwa negara-negara yang tergabung didalamnya telah memiliki akuntabilitas dalam pemerintahannya agar komitmen pada pemerintahan yang terbuka bisa segera tercapai.

Open Government Partnership di Indonesia diwujudkan melalui OGI (*Open Government Indonesia*) yang mengusung rencana aksi yang mendorong transparansi seperti pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, partisipasi publik, hingga mewujudkan berbagai inovasi.

¹³ <http://www.ogp.org/wp-content/uploads/2013/11/meningkatan-pengalaman-ogp.pdf> diakses pada 01 September 2014.

¹⁴ *Ibid.*,

Pencapaian dan progres implementasi rencana aksi OGP selama periode tahun 2012 secara umum mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Kemajuan signifikan umumnya terjadi pada transparansi data/dokumen menyangkut pelayanan dasar masyarakat yang dilakukan melalui website instansi terkait. Contohnya transparansi dalam implementasi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan Beras Miskin, transparansi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), transparansi program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), transparansi layanan publik, transparansi pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Pusat dan Daerah, hingga transparansi informasi keuangan negara melalui publikasi data APBN, RAPBN, dan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian-Lembaga)¹⁵.

Namun pencapaian tersebut juga masih belum bisa dirasakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bahwa memang harus diakui tidak mudah bagi Indonesia dalam mencapai apa yang diharapkan *Open Government Partnership* karena *Open Government Partnership* ini termasuk program yang dapat dikatakan masih baru dan belum banyak diketahui oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional karena Indonesia memiliki 500 kabupaten kota dengan 34 provinsi yang belum mengenal isu *Open Government Partnership*¹⁶.

Di lain pihak, Transparency International Indonesia (TII) selaku Organisasi Masyarakat Sipil, melalui Global Corruption Barometer (GCB) nya pada tahun 2013 memberikan sinyal mengkhawatirkan. Laporan yang mengukur efektifitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor publik rawan korupsi menemukan bahwa 72% publik menilai

¹⁵<http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2013/10/OG-Indonesia-Government-Self-Assessment-Report-2012-ID.pdf>, diakses pada 06 Mei 2014

¹⁶ Dunia Akui Peran Indonesia Di Kancan Internasional, <http://www.antarabengkulu.com/berita/19275/dunia-akui-peran-indonesia-di-kancan-internasional> diakses pada 24 Agustus 2014.

korupsi meningkat dan 65% mengatakan upaya pemberantasan korupsi belum efektif. Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa polisi, parlemen, peradilan, dan birokrasi merupakan empat lembaga paling korup di Indonesia¹⁷.

Berdasarkan Laporan Penelitian *Scorecard* mengenai Hukum dan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Terbuka di Indonesia yang diterbitkan oleh TII pada Maret 2014 lalu, tingginya penyalahgunaan jabatan-jabatan politik dan birokrasi, serta lemahnya penegakan hukum dalam sistem ekonomi-politik yang transaksional saat ini terus membuat performa Indonesia dalam *Corruption Perception Index* beranjak sangat pelan. Pada tahun 2013 Indonesia stagnan di angka 32, sama dengan skor tahun sebelumnya, meskipun beranjak ke urutan 114 dari 177 negara dari posisi 118 di tahun 2012 (skor 0-100; 0 untuk negara yang paling korup dan 100 untuk yang paling bersih). Skor ini menunjukkan kondisi korupsi yang masih sistemik, khususnya dalam bidang politik dan hukum¹⁸.

Hal tersebut menjadi sangat berbeda ketika kita melihat Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan di Indonesia yang menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas¹⁹. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, bahwa pemerintah telah berupaya memperkenalkan sejumlah Undang-Undang baru yang mendorong kebebasan demokratis²⁰. Dalam Laporan Penilaian *Scorecard* yang dilakukan oleh TII pun menunjukkan bahwa kerangka hukum yang menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah memberikan fundamen yang kokoh untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di

¹⁷ http://www.ti.or.id/media/documents/2014/05/14/1/a/laporan_scorecard_final_low.pdf diakses pada 24 Agustus 2014.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ <http://www.ogphub.org/wp-content/uploads/2013/11/meningkatan-pengalaman-ogp.pdf> diakses pada 01 September 2014.

Indonesia. Dalam setiap dimensi dan sektor tata kelola pemerintahan yang diukur, indikator-indikator yang terpenuhi selalu lebih dari separuh. Secara keseluruhan, sebanyak 58% indikator terpenuhi dan 20% indikator terpenuhi sebagian. Sisanya hanya 20% yang tidak terpenuhi sama sekali. Hanya dimensi alat (*tools*) yang masih lemah²¹.

Berdasarkan Laporan Penelitian TII juga diungkapkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabel tersebut menghadapi hambatan serius oleh praktik ekonomi-politik oligarki yang semakin menguat satu dekade terakhir ini. Masih kuatnya ‘mental tertutup’ di jajaran legislatif dan birokrasi juga turut memberikan peluang bagi mereka dalam pembuatan kebijakan yang berlawanan arah dengan kerangka hukum sebelumnya. Diungkapkan pula oleh TII bahwa DPR dan pemerintah belum bekerja secara optimal dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan konstitusi dan kerangka hukum nasional dalam perwujudan tata kelola pemerintahan terbuka. Oleh karena itu, upaya mereformasi hukum dan perundang-undangan harus pula dibarengi secara politik, mendemokratisasikan ruang-ruang politik, dan memerangi kekuatan-kekuatan korup yang ingin mengambil alih arah dan capaian reformasi²².

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, yaitu:

“Mengapa Indonesia bergabung dalam program *Open Government Partnership*?”

²¹ *Op.Cit*,

²² http://www.ti.or.id/media/documents/2014/05/14/1/a/laporan_scorecard_final_low.pdf diakses pada 24 Agustus 2014.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep *Global Governance*

Governance merujuk pada aktivitas yang berlandaskan tujuan atau kepentingan bersama, yang bisa saja—namun tidak selalu—bersumber pada tanggung jawab legal formal, dan tidak bergantung pada keharusan adanya kekuasaan atau otoritas, baik untuk memastikan pemenuhannya, ataupun untuk menyelesaikan pertentangan yang timbul dalam pelaksanaannya²³. *Governance* merupakan fenomena yang lebih luas dan kompleks dari *government* sebab ia melingkupi institusi pemerintah, dan di sisi lain juga melibatkan mekanisme informal/non-pemerintah, yang di dalamnya individu dan organisasi bersama-sama bekerja mencapai tujuannya²⁴.

²³ Budi Winarno, 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.262.

²⁴ *Ibid*

Kiranya uraian tersebut dapat ditarik dan diaplikasikan ke skala global dalam memahami *global governance*. Berdasarkan uraian diatas, setidaknya terdapat empat poin yang dapat diaplikasikan dalam lingkup global. *Pertama*, adanya aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dalam hubungan internasional. *Kedua*, aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung dalam kerangka aturan tertentu (*system of rules*), yang ditetapkan dan dipandu oleh persetujuan bersama yang mengikat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. *Ketiga*, *system of rules* tersebut berjalan baik bila diterima oleh mayoritas aktor yang terlibat, atau paling tidak, oleh aktor-aktor yang lebih kuat. *Keempat*, aktivitas-aktivitas yang berlangsung tidak tergantung pada keharusan adanya otoritas yang lebih tinggi sebagai pengatur²⁵.

Commission on Global Governance memberikan definisi tentang *global governance* sebagai “*the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs*”²⁶.

Global governance merupakan pangkal dari upaya untuk memahami perkembangan-perkembangan global yang muncul saat ini. *Pertama*, semakin pentingnya pemaknaan akan tataran lain dalam politik internasional selain negara bangsa. *Ketiga*, semakin besarnya peran aktor-aktor politik non-negara, seperti NGO dan perusahaan swasta lainnya, bahkan individu. Berbagai perkembangan tersebut merubah kondisi bagi penerapan kontrol politik, yang secara keseluruhan kemudian dikenal dengan *global governance*.²⁷

2. Teori Demokrasi

²⁵ *Ibid*, hal.263

²⁶ *Ibid*, dikutip dari Lee & McBride (eds.) 2007. *Neo-liberalism, State Power and Global Governance*. AA Dordrecht: Springer, hal.10.

²⁷ Budi Winarno. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.265

Demokrasi merupakan sebuah ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal kebebasan individu, persamaan, martabat dan persaudaraan, *rule of law*, serta proses politik demokratis. Meskipun masih banyak terjadi keragaman mengenai penafsiran dan pelaksanaannya, demokrasi politik yang menekankan hirauan terhadap konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggung jawab, jaminan kebebasan sipil, *the rule of law*, serta asas mayoritas, tetap merupakan inti ideologi demokrasi²⁸. Dalam teori demokrasi, terdapat beberapa prinsip mendasar, seperti:

- Akuntabilitas

Sebuah prinsip mendasar dari teori demokrasi yang menetapkan tanggung jawab tertinggi para abdi negara dan aparat pemerintah terhadap rakyat. Pertanggung jawaban dijaga melalui pemilihan umum, pengawasan konstitusional, prakarsa, referendum, *recall*, penelitian dan poll opini masyarakat, kegiatan partai politik, rapat umum, kebebasan berserikat, menyampaikan petisi, mengemukakan pendapat, kebebasan pers, serta pemungutan suara pada lembaga legislatif²⁹.

- Kebebasan Individu

Jaminan bahwa kebebasan individual tidak akan dibatasi secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Kebebasan sipil biasanya terpaut dengan hak-hak manusia atau konstitusi yang mengurai secara rinci pembatasan khusus kewenangan aparat pemerintah. Perlindungan bagi kebebasan sipil individual serta kebebasan untuk berbeda pendapat merupakan kunci penting dalam keyakinan demokrasi, meski demikian, tidak ada hak yang tanpa batas; semua hak dibatasi

²⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, Edisi ketiga. *Kamus Hubungan Internasional*, Terjemahan Wawan Juanda: Putra Abardin, hal.53-54.

²⁹ *Ibid.*, hal.55

oleh tuntutan atau kewajiban untuk melindungi serta memajukan kepentingan umum seluruh anggota masyarakat³⁰.

- Konstitusionalisme

Konsep dasar yang menyatakan bahwa pemerintah demokrasi memiliki kekuasaan terbatas, memberikan peluang bagi aparat pemerintah untuk menjalankan kekuasaan tersebut serta melaksanakan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku³¹.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh hipotesa dari kepentingan ekonomi dan politik Indonesia dalam program *Open Government Partnership* yaitu:

Pertama, secara ekonomi, dengan bergabungnya Indonesia dalam program *Open Government Partnership* akan meningkatkan kerjasama Indonesia dalam forum ekonomi global;

Kedua, secara politik, *Open Government Partnership* akan mendorong berlangsungnya percepatan konsolidasi demokrasi di Indonesia dan mendorong Indonesia terintegrasi dengan *global governance*.

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deduktif dalam metode penelitiannya yaitu dengan berdasarkan kerangka pemikiran, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui

³⁰ *Ibid.*, hal.56

³¹ *Ibid.*,

data-data empirik yang ada. Metode penelitian yang digunakan penulis lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan menggunakan situs-situs internet yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia dalam program *Open Government Partnership* (OGP).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif, menjelaskan mengenai program *Open Government Partnership* (OGP) yang mengangkat isu “Pemerintah Terbuka” yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan inovasi. Penelitian ini menjelaskan mengenai perwujudan *Open Government Partnership* di Indonesia melalui OGI (*Open Government Indonesia*) hingga kepentingan ekonomi dan politik Indonesia terlibat dalam program *Open Government Partnership*. Untuk menghindari meluasnya penulisan ilmiah ini, maka penulis membatasi jangkauan penelitian, yaitu sejak awal terbentuknya program *Open Government Partnership* pada tahun 2011 hingga rencana aksi pada tahun 2013 dan kepentingan nasional Indonesia terlibat dalam program *Open Government Partnership*. Pembatasan ini dimaksudkan agar penulis dapat fokus dan mempermudah penelitian serta pengumpulan data.

H. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan ini bertujuan untuk mengobservasi atau meneliti permasalahan yang terjadi serta menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan fakta dan data.
2. Menerapkan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional pada isu-isu kontemporer sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang dipelajari selama perkuliahan.
3. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sebelumnya serta aspek-aspek yang belum termasuk di dalam penulisan ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

I. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah upaya penulisan, maka sistematika penulisan dalam hal ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain adalah :

Bab pertama; menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua; menjelaskan tentang program *Open Government Partnership* (OGP) sebagai platform kerjasama multilateral yang mendukung pemerintahan terbuka yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan inovasi.

Bab ketiga; dalam bab ini penulis akan memaparkan keterlibatan Indonesia dalam program *Open Government Partnership* (OGP) yang diwujudkan melalui OGI (*Open Government Indonesia*).

Bab keempat; pada bab ini akan dijelaskan mengenai kepentingan ekonomi-politik yang memotivasi Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka sebagai dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, pelayanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera.

Bab kelima; dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan terkait dengan bab-bab yang sebelumnya dibahas.